

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu bentuk tentang cara- cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Istilah “demokrasi” berasal dari dua kata Yunani kuno yaitu “*demos*” dan “*cratein*” yang masing- masing berarti “rakyat” dan “pemerintah”. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri.

Demokrasi berkembang dan menjadi mapan di negara- negara barat kerana memang didasarkan pada karakteristik masyarakat barat yang rasional dan berpaham liberal dalam arti individualime. Kemudian Demokrasi dalam arti demokrasi modern lahir sebagai hasil pergulatan pemikiran para pemikir Barat sejak masa *Renaissance* di abad ke 15, berkembang lebih lanjut selama masa Pencerahan (*Enlightenment*) di abad ke 17, yang diikuti dengan penerapannya di abad- abad selanjutnya pasca Revolusi Amerika tahun 1776 dan pasca Revolusi Perancis tahun 1789. Gagasan tentang demokrasi ini kemudian menyebar ke bagian dunia yang lain, yaitu daerah- daerah jajahan Bangsa Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga masa sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa kali periodisasi

sejarah politik yaitu; Demokrasi Liberal (1945- 1949), Demokrasi Parlementer (1950- 1959), Demokrasi Terpimpin (1959- 1965), Demokrasi Pancasila (1966- 1998), dan Demokrasi pada masa Reformasi ( 1998- sekarang). Indonesia sendiri mengalami pembaharuan politik mendasar sejak tahun 1998, menandai berakhirnya dua bentuk sistem pemerintahan yang otoriter sebelumnya yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai tantangan. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan politik Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, tetapi pelaksanaan sistem yang otoriter pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah mengubur prinsip kedaulatan rakyat secara substantif.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan pemerintah yang absolut seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu ada beberapa sistem- sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia ternyata tidak mencerminkan sistem politik yang demokratis seperti sentralisasi politik, dan pengambilan keputusan di Parlemen dengan sistem voting (pungutan suara).

Tentunya beberapa sistem seperti ini tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat . Seperti halnya yang telah dilakukan oleh para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) di masa-masa mereka merintis kemerdekaan melalui sidang- sidang BPUPKI dan PPKI dalam periode Mei- Agustus 1945. Pemikiran dan sikap dari para pendiri bangsa terdahulu menggambarkan cara berdemokrasi yang baik.

Ternyata, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, sejak awal tahun 1930-an, Mohammad Hatta telah menawarkan gagasan tentang demokrasi untuk Indonesia merdeka yang terangkum dalam tulisan yang berjudul “Ke Arah Indonesia Merdeka”. Melalui tulisan tersebut, Mohammad Hatta menawarkan demokrasi berdasarkan asas kebersamaan, yaitu prinsip hidup bersama warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak berabad- abad lalu. Mohammad Hatta dipandang oleh banyak kalangan sebagai peletak dasar konsep ke Indonesiaan yang lebih mendalam, yaitu konsep keadilan, keterbukaan dan demokrasi . Dalam konsep demokrasi yang digagas oleh Hatta, demokrasi Indonesia hendaknya dibangun berlandaskan nilai etika/moral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian bagi Hatta, demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat yang bebas dan merdeka. Dalam gagasannya, pelaksanaan politik harus mengutamakan praktik musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selanjutnya, Demokrasi yang digagas oleh Mohammad Hatta adalah demokrasi yang lahir dari budaya asli rakyat Indonesia. Menurut Mohammad Hatta rakyat Indonesia sudah sejak zaman dahulu mengenal demokrasi, bahkan

sudah memiliki tradisi yang baik dalam hidup berdemokrasi. Walaupun demokrasi itu berlaku pada tingkat desa saja. Demokrasi ini sering diistilahkan oleh Mohammad Hatta sebagai Demokrasi Desa. Adapun demokrasi asli yang ada di desa- desa di Indonesia mempunyai tiga sifat utama, yaitu Rapat/ Musyawarah, Kebebasan untuk menolak/ menentang kebijakan yang tidak adil, dan Kebersamaan (saling tolong menolong/ gotong royong). Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dari demokrasi yang digagas oleh Mohammad Hatta yang mana lebih dikenal dengan istilah Demokrasi Kerakyatan.

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama perjalanan politik dari masa awal kemerdekaan hingga masa orde baru justru bertentangan dengan demokrasi yang dicita- citakan oleh Mohammad Hatta. Kemudian menurut Hatta, demokrasi yang diterapkan di Indonesia seharusnya tidak hanya demokrasi politik saja, tetapi harus juga didampingi oleh demokrasi ekonomi. Karena bagi Hatta, jika hanya demokrasi politik tanpa saja yang diterapkan, maka tidak akan terwujud keadilan bagi rakyat.

Adapun yang menjadi sumber pemikiran Mohammad Hatta, ada tiga sumber gagasannya mengenai demokrasi yaitu: ajaran Islam mengenai kebenaran dan keadilan yang dikaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah (penyebarkan kebaikan) di muka bumi, demokrasi asli Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan/ kebersamaan dan paham sosialisme Barat tentang perikemanusiaan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa gagasan tentang demokrasi Indonesia dalam pemikiran Mohammad Hatta menarik untuk diteliti. Sebenarnya

sudah banyak karya- karya ilmiah yang menuliskan tentang gagasan- gagasan Mohammad Hatta mengenai Indonesia. Akan tetapi masih jarang karya-karya yang secara khusus menulis tentang gagasan Mohammad Hatta tentang demokrasi untuk Indonesia. Berdasarkan alasan diatas, maka konsep Demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Mohammad Hatta menarik untuk dijadikan sebuah penelitian Ilmiah.

### **B. Identifikasi Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka perlu dilakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemikiran Mohammad Hatta dalam menggagas demokrasi untuk Indonesia
2. Pemikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia sebagaimana terlihat dalam tulisan- tulisannya yang lahir baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Indonesia
3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang digagas oleh Mohammad Hatta.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah haruslah dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak terlalu luas. Dalam hal ini pembatasan masalah akan

mempermudah sasaran yang dicapai. Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah adalah:

1. Latar belakang gagasan Demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Mohammad Hatta.
2. Pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam tulisan- tulisannya
3. Pelaksanaan gagasan Mohammad Hattatentang demokrasi di Indonesia

#### **D. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penulis merasa perlu merumuskan masalah untuk memperoleh jawaban terhadap masalah dan penelitian ini terarah dengan baik. Dengan demikian sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang gagasan Demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Mohammad Hatta?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Hatta tentang gagasan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam tulisan- tulisannya ?
3. Bagaimana pelaksanaan gagasan Mohammad Hatta tentang Demokrasi di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang gagasan Demokrasi di Indonesia dalam pemikiran Mohammad Hatta.
2. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia
3. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang digagas oleh Mohammad Hatta

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang peran Mohammad Hatta dalam meletakkan konsep demokrasi bagi Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam masalah yang sama.
3. Menambah bahan masukan dan bahan kajian untuk mahasiswa pendidikan sejarah.
4. Menambah perbendaharaan karya ilmiah bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Negeri Medan.